

**IMPLEMENTASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN KALIPANCUR,
KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG
(BANK SAMPAH INDRIA JAYA)**

Maulana Fajar Gimnastiar¹, Teguh Yuwono², Neny Marlina³

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

DiponegoroJl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang

Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)

7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email

fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan sampah melalui bank sampah merupakan upaya dalam memberdayakan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah yang ada. Dimana masing-masing rumah tangga dapat melakukan pemilahan mandiri. Kegiatan pengelolaan bank sampah adalah perwujudan dari *collaborative governance* karena dalam pengelolaannya dilakukan melalui bentuk kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses tahapan dan faktor-faktor keberhasilan dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya Kelurahan Kalipancur Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Pada pemilihan informan, informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori milik Morse dan Stephens (2012:567) terdiri dari Tahapan *Collaborative Governance* dan teori Goldsmith dan Donald (2009: 135-136) tentang kriteria keberhasilan *Collaborative Governance*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan kolaborasi dapat berjalan dengan baik dipengaruhi jika kriteria keberhasilan terpenuhi seperti adanya rasa kepercayaan, komitmen yang kuat, sumber daya yang berkualitas, dan pembagian tanggung jawab yang jelas dibuktikan dengan adanya dampak dan respon positif yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Kalipancur. Selain itu, hadirnya kolaborasi di bank sampah selain dapat mengurangi tumpukan sampah tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam kolaborasi di Bank Sampah Indria Jaya terjadi hirarki dalam struktur jaringan kolaborasi. Selain itu, terjadi perubahan komitmen tujuan awal yang dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing aktor kolaborasi yang membuat kinerja dan kontribusi setiap aktor tidak dapat maksimal.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Tahapan Kolaborasi, Faktor-Faktor Keberhasilan

PENDAHULUAN

Collaborative Governance hadir saat era paradigma *governance*, di mana pemerintah sedang menghadapi peningkatan kompleksitas masalah seiring dengan berkembangnya masyarakat. Pemerintah juga diketahui terbatas dari segi waktu dalam menangani isu-isu yang ada sehingga dibutuhkan adanya kerja sama dengan para aktor eksternal (Charalabidis et al., 2012: 264).

Ansel dan Gash (2007: 543) menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah strategi inovatif dalam pengelolaan pemerintahan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus. Ansell dan Gash juga menggambarkan *collaborative governance* sebagai sebuah pengaturan pengelolaan pemerintahan di mana proses penyusunan kebijakan bersama membuat institusi publik bekerja sama dengan aktor non-pemerintah dalam merancang atau menjalankan kebijakan publik, mengurus program, atau aset publik.

Dari berbagai pernyataan yang dikemukakan para ahli, *collaborative governance* dapat disimpulkan sebagai proses interaksi formal dan informal dalam jaringan lintas sektor (*governments, private sector, civil society*) yang ditujukan untuk menghasilkan konsensus dalam penyusunan dan pengembangan norma. Maka dari itu, interaksi dalam proses kerja sama ini bersifat egaliter, yang berarti seluruh aktor yang terlibat memiliki posisi yang setara.

Ansel dkk. (sebagaimana dimaksud dalam Tresiena et al., 2017) mendefinisikan beberapa kondisi penting untuk membangun teknik kolaboratif, antara lain: (1) Keterlibatan pemangku kepentingan; (2) Adanya situasi yang mendorong kesetaraan kekuasaan; dan (3) Adanya aktor yang mumpuni.

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan isu yang mendesak dan memerlukan penyelesaian yang

berkesinambungan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Banyaknya sampah yang tertimbun dan tidak dikelola akan melahirkan faktor utama pencemaran lingkungan, seperti menghasilkan aroma tidak menyenangkan dan tempat berkembangnya penyakit. Pembuangan sampah yang tidak terfasilitasi dengan baik membuat sampah akhirnya dapat mencemari lingkungan. Maka, dibutuhkan kemauan dan kesiapan dari pemerintah dan masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang efektif dalam menanggulangi sampah.

TPA Jatibarang memiliki luas 46 hektare yang terdiri dari 27,64 hektare untuk area buang, 4,6 hektare infrastruktur, 13,8 hektare kolam lindi, sabuk hijau, dan lahan cover. Peningkatan kuantitas sampah diikuti oleh total penduduk yang berkembang pesat. Kota Semarang mempunyai penduduk sekitar 275.361.267 jiwa. Total produksi sampah Kota Semarang yang tercatat oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang adalah 1.110 ton dalam sehari. Hal tersebut menunjukkan peningkatan produksi sampah Kota Semarang apabila dibandingkan pada saat awal pandemi yang memiliki total sampah 900 ton per hari. Permasalahan pengelolaan sampah semakin sulit diatasi karena Kota Semarang hanya memiliki satu lokasi akhir penampungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang.

Isu sampah dapat menjadi lebih rumit apabila naiknya total produksi sampah tidak diiringi dengan upaya meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dalam hal ini, jika kita melihat permasalahan sampah yang ada di Semarang yaitu TPA Jatibarang saat ini mengalami berbagai masalah yang mana sudah lama mengalami *overload*. Rata-rata sampah yang dibuang ke TPA Jatibarang mencapai 1.110-1.150 ton per hari. Meskipun Pemkot Semarang terus melakukan inovasi dalam pengolahan sampah di TPA, menciptakan listrik

melalui gas yang dibentuk dari sampah, hal itu belum maksimal dapat menekan permasalahan sampah yang terjadi.

Salah satu cara Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi peningkatan sampah yang semakin menumpuk yaitu dengan adanya program Bank Sampah. Bank sampah merupakan lokasi pengumpulan sampah untuk selanjutnya dilakukan persortiran. Sampah yang telah disortir akan dialokasikan ke tempat pengolahan kerajinan dari bahan sampah atau tempat pengepul sampah. Bank sampah dijalankan dengan sistem yang menyerupai perbankan dan diurus oleh sukarelawan.

Bank Sampah Indria Jaya (BSIJ) adalah salah satu bank sampah di Kota Semarang yang telah melakukan kemitraan dengan pihak pemerintahan dan non pemerintahan. Bank Sampah Indria Jaya terletak di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Bank Sampah Indria Jaya (BSIJ) menjadi bank sampah pusat yang ada di Kelurahan Kalipancur Kota Semarang. Berdirinya bank sampah ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, serta akumulasi sampah yang menumpuk secara signifikan. Pada Desember 2016, Kelurahan Kalipancur mendapatkan kepercayaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan dibangunkannya bank sampah dan saat ini terus berkembang karena dukungan dari warga dan PT *Indofood* serta LSM Bintari. Dipilihnya Kelurahan Kalipancur karena bank sampah sudah lama diaplikasikan di setiap RT dan RW dari Kelurahan Kalipancur. Awal mula kolaborasi dilakukan merupakan inisiasi dari kepentingan Lurah Kalipancur Ibu Indriastuti dan pengurus bank sampah yang ingin memajukan Bank Sampah Indria Jaya karena menilai dari kualitas SDM, anggaran, dan sarana prasarana di Bank Sampah Indria Jaya belum memadai. Kemudian Pemerintah Kelurahan Kalipancur menilai bahwa komitmen yang ditujukan oleh pengurus Bank Sampah

Indria Jaya sangat kuat sehingga Pemerintah Kelurahan Kalipancur memberikan kepercayaan dan membantu untuk menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahun 2018 Bank Sampah Indria Jaya resmi mendapatkan dukungan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adanya bank sampah di Kelurahan Kalipancur memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat hingga saat ini, misalnya lingkungan Kalipancur terjaga kebersihannya, dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang, sampah dapat diolah menjadi kerajinan, dan hasil penjualan sampah dapat memberikan pemasukan tambahan sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Kalipancur. Terdapat 2 program Bank Sampah Indria Jaya yaitu Tukar Sampah dan Sedekah Jelantah. Kelurahan Kalipancur juga mendirikan unit-unit bank sampah di setiap RT/RW sehingga akomodir sampah dapat dikumpulkan di RT/RW nya masing-masing terlebih dahulu kemudian baru disalurkan ke pusat Bank Sampah Indria Jaya. Bank Sampah Indria Jaya juga memfasilitasi sistem penjemputan sampah untuk nasabah bank sampah yang memiliki kendala akses untuk datang langsung ke Bank Sampah Indria Jaya.

Keberhasilan Bank Sampah Indria Jaya dalam mengelola sampah di Kelurahan Kalipancur ini tidak lepas dari dukungan masyarakat Kalipancur itu sendiri yang mendukung program-program bank sampah. Bentuk dukungan masyarakat Kalipancur salah satunya yaitu dengan menjadi nasabah bank sampah sehingga setiap minggunya masyarakat dapat rutin menukarkan atau menjual sampah mereka ke bank sampah. Selain itu, terdapat dukungan dari pihak pemerintah dan swasta dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah dan juga memberikan pelatihan kepada masyarakat seperti membuat kerajinan tangan dari sampah, ecobrick, ecoenzyme,

dan lain sebagainya.

Mengingat penyelenggaraan bank sampah di Kelurahan Kalipancur melibatkan banyak pemangku kepentingan, maka kajian mengenai *collaborative governance* menjadi menarik. Melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan, pengelolaan bank sampah di Kelurahan Kalipancur dapat beroperasi secara efisien dan bertahan lama. Mengacu pada penelitian yang dilakukan Andi Nur Qalby (2018) tentang *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Desa Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Bank Sampah Pusat), temuan tersebut menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah saat ini sudah berjalan di Desa Paropo. Proses ini menunjukkan keuntungan penting dalam hal inovasi berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan dengan partisipasi warga yang besar dalam pengelolaan limbah. Namun, efektivitas pencapaian inovasi terhambat oleh permasalahan seperti kepercayaan yang rendah antar pemangku kepentingan, kurangnya pertukaran informasi dan komunikasi, yang mengakibatkan proses inovasi tidak seefektif yang diharapkan.

Berdasarkan contoh penelitian terdahulu diatas ditemukan bahwa dalam *collaborative governance* yang dilakukan masih ditemukan berbagai kelemahan. Hal serupa juga terjadi dalam kolaborasi di Bank Sampah Indria Jaya. Berdasarkan pengamatan awal pada penelitian ini, bukti praktis menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Kalipancur belum mencapai potensi maksimal. Menurut Huxam dan Herbert, indikator kunci keberhasilan *collaborative governance* terletak pada pencapaian tujuannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penyebab tidak tercapainya tujuan dari inisiatif *Collaborative Governance* Bank Sampah Indria Jaya adalah sebagai berikut:

Awalnya, muncul hambatan yang

mempersulit penyalarsan beragam kepentingan menuju tujuan bersama. Meskipun kolaborasi dari berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan bank sampah, kenyataannya menunjukkan bahwa Bank Sampah Indria Jaya belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya ketidakselarasan tujuan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan pemangku kepentingan lainnya. Ditetapkan konsensus bahwa pengelolaan sampah harus berbasis masyarakat, yang bertujuan untuk mengurangi sampah dan mengubah cara pandang masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Namun, sektor swasta yang terlibat dalam Bank Sampah Indria Jaya memiliki tujuan dan misi yang berbeda dibandingkan dengan pemerintah, dengan fokus utama pada perolehan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah.

Persoalan kedua berkisar pada kesulitan komunikasi antara DLH Kota Semarang dengan Bank Sampah Indria Jaya. Kolaborasi yang efektif memerlukan informasi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, namun masih terdapat kelemahan dalam menyebarkan informasi ini. Selain itu, terdapat tantangan juga mengenai keterlibatan aktif setiap pemangku kepentingan yang setara sebagai pelaksana kolaborasi dalam bank sampah. Akibatnya, kesadaran masyarakat Kalipancur masih rendah dan terbatas dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Melihat dan mencermati fenomena yang terjadi, maka peneliti ini ingin meneliti lebih jauh tentang *Collaborative governance* dengan mengambil judul “Implementasi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya)” untuk menganalisis bagaimana proses dan faktor-faktor keberhasilan Bank Sampah Indria Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut memberikan gambaran rinci tentang tahapan proses kolaborasi serta faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan Bank Sampah Indria Jaya di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kelurahan tersebut merupakan obyek yang relevan untuk mengkaji *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Pusat perhatian penelitian ini diarahkan untuk memberikan batasan yang jelas kepada peneliti dalam mengumpulkan data. Proses pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada tahapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah, yaitu penilaian, inisiasi, deliberasi, dan implementasi di Bank Sampah Indria Jaya, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, serta menganalisis kriteria-kriteria keberhasilan *collaborative governance* yaitu *networked structure, commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, distributive accountability/responsibility, information sharing, access to resources*. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2011:96), yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk menilai keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Analisis

dan interpretasi data dengan cara yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Proses *Collaborative Governance* Bank Sampah Indria Jaya

A. Assesment (Penilaian)

Langkah awal dalam proses kolaborasi dikenal sebagai penilaian (*assessment*). Tahapan ini menjelaskan kondisi awal yang memegang peran kunci dalam keberhasilan kolaborasi antara para pemangku kepentingan. Sebelum memutuskan kapan harus berkolaborasi, langkah krusial yang perlu diambil adalah mengidentifikasi kelompok atau individu pemangku kepentingan yang memiliki potensi untuk terlibat dalam kolaborasi. Dalam penelitian ini khususnya di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang menurut data wawancara dengan pihak Yayasan Bintari *Foundation* terkait hasil analisis pihak Bintari yang didapatkan dari laporan bank sampah bahwa setiap KK setiap bulannya menghasilkan sampah \pm 60 kg dan terdapat sedikitnya 300 ton sampah yang dihasilkan selama setahun di Kecamatan Ngaliyan. Sejumlah 32 % atau sekitar 96 ton sampah tersebut merupakan jenis anorganik. Tidak adanya kesadaran masyarakat dan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengatasi dan mengolah sampah tersebut menimbulkan berbagai masalah bagi lingkungan di Kelurahan Kalipancur. Dari masalah tersebut muncul inisiasi dari pihak pemerintah Kelurahan Kalipancur yang didukung oleh DLH Kota Semarang, pada Desember 2016 didirikannya bank

sampah di Kelurahan Kalipancur. Dalam keberjalanannya, Bank Sampah Indria Jaya bisa dikatakan masih kurang optimal dalam menangani pengolahan sampah dikarenakan terhambat dari pengetahuan SDM yang ada, anggaran, dan sarana & prasarana yang kurang memadai. Pengelola Bank Sampah Indria Jaya juga mengaku meskipun sudah disediakan kantor oleh pemerintah Kelurahan Kalipancur akan tetapi sarana & prasarana yang ada masih jauh dari harapan. Khususnya juga DLH Kota Semarang dinilai tidak kooperatif dalam menjalankan tugasnya yang mana seharusnya memberikan arahan dan bimbingan dalam oprasional bank sampah setelah didirikannya bank sampah. Keterbatasan yang ada di Bank Sampah Indria Jaya diatasi dengan mengambil langkah untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Upaya yang dilakukan ini berupa *collaborative governance* yang mana melibatkan 3 komponen pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi ini antara lain Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Kelurahan Kalipancur, pihak swasta yaitu PT *Indofood* dan *Bintari Foundation* yang berkedudukan sebagai lembaga donor program CSR yang bergerak dalam bidang lingkungan, serta masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kalipancur. Pemerintah kelurahan sendiri memberikan dukungan dan kebebasan kepada pihak bank sampah untuk berkembang melalui *Collaborative Governance*. Karena dengan adanya kolaborasi tersebut dapat menguntungkan semua pihak

yang terlibat dan memberikan dampak serta hasil yang optimal. Kolaborasi antara *stakeholder* yang terjadi di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dalam pengelolaan sampah dinilai sangat penting.

B. *Initiation*

Tahapan kolaborasi yang kedua yaitu permulaan (*initiation*). Tahapan ini bertujuan untuk membangun komitmen antar pemangku kepentingan untuk bekerjasama. Dalam prosesnya tahapan ini meliputi pembentukan kelompok, adanya forum dimana masing-masing pemangku kepentingan berpartisipasi dalam forum kolaborasi tersebut. Sebelumnya, para pemangku kepentingan berkomunikasi dengan pihak lain yang memiliki potensi menjadi pemangku kepentingan, dan melakukan penilaian terhadap sejauh mana minat dan kepentingan mereka dalam partisipasi dalam kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang terjadi di Bank Sampah Indria Jaya Kelurahan Kalipancur pada waktu itu, sudah terlaksana pertemuan yang dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan mulai dari pemerintah Kelurahan Kalipancur Ibu Indriatuti, SE, MM selaku Lurah Kalipancur bersama jajarannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, PT *Indofood* yang diwakili oleh CSR senior Manager PT *Indofood* CBP Sukses Makmur, Deni Puspahadi, Yayasan *Bintari Foundation* dan beberapa tokoh masyarakat yang diwakili oleh Bapak Mianto, Ibu Sri Suyatmi, Bapak Suryono, Ibu Sri Prabandin Budiyono, Bapak Suparno, Ibu Dina Satono, Ibu Sri Hartini, dan Ibu Sri Mulyani Murti Hadi yang bertempat di Kantor Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan,

Kota Semarang. Pertemuan yang dilakukan ini bertujuan untuk pengenalan dan pembentukan kelompok yang akan terlibat dalam proses kolaborasi sekaligus peresmian Bank Sampah Indria Jaya. Tepatnya pada tanggal 8 Maret 2018 telah diresmikan Bank Sampah Indria Jaya oleh pemangku kepentingan Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam proses kolaborasi yang kedua yaitu *Initiation* di Bank Sampah Indria Jaya masih memiliki kelemahan dimana tidak ada bentuk komitmen tertulis Sehingga, tidak ada keputusan yang tegas terkait kewenangan pembagian di antara para pemangku kepentingan yang terlibat.

C. *Deliberation*

Kemudian tahapan kolaborasi yang ketiga yaitu *deliberation* (musyawarah). Tujuan tahapan ini yaitu untuk mencapai pemahaman bersama tentang isu tersebut, mengidentifikasi solusi potensial, dan merancang rencana tindakan bersama melalui diskusi dan negosiasi. Cakupan dalam tahapan ini berupa membuat aturan dasar atau menetapkan peraturan dasar kolaborasi. Menurut informasi dari salah satu narasumber penelitian dalam prakteknya proses kolaborasi pada pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya tidak ada aturan dasar yang jelas dari awal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mianto selaku Ketua Bank Sampah menyebutkan bahwa tidak ada aturan dasar yang mengikat. Hal ini juga memberikan dampak terhadap kinerja bank sampah itu sendiri yang menjadi tidak konsisten dalam memberikan laporan pertanggung jawaban ke masing-masing pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan

penjelasan dari Bapak Anggun Budi Pramono, S.Sos, M.A.P selaku Lurah Kelurahan Kalipancur yang menyebutkan bahwa sebenarnya pihak pemerintah secara spesifik meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan bank sampah akan tetapi pihak kelurahan tidak pernah menerima laporan tersebut. Dari pernyataan tersebut peneliti menilai bahwa pemerintah kelurahan mewajarkan hal tersebut karena pemerintah hanya melihat dari progres yang dilakukan oleh bank sampah setiap minggunya yaitu melakukan pengelolaan sampah di lingkungan Kalipancur yang mana juga mengajak kader-kader PKK untuk berkontribusi dalam program sedekah jelantah. Artinya, disini pihak pemerintah juga tidak tegas dalam menjalankan mekanisme pelaporan di bank sampah sehingga pemerintah tidak mengetahui secara jelas progres dan kendala yang dialami oleh bank sampah. Jika hal ini tetap bertahan maka memungkinkan bank sampah akan kehilangan eksistensinya dikemudian hari. Kemudian poin penting dalam proses kolaborasi yang ketiga *deliberation* yaitu adanya diskusi dan negosiasi dalam forum. Melalui musyawarah yang diadakan di Kelurahan Kalipancur pada tanggal 8 Maret 2018 seluruh pemangku kepentingan mulai dari aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat pada akhirnya memiliki kesepakatan bersama untuk membangun Bank Sampah Indria Jaya di Kelurahan Kalipancur. Mendirikan bank sampah ini memiliki tujuan bersama, yakni mengurangi volume sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui inovasi program-program bank sampah di Kelurahan Kalipancur. Melalui proses diskusi dan musyawarah yang cukup

panjang mulai dari pengenalan pemangku kepentingan, menilai urgensi dan tujuan yang ingin dicapai dari kolaborasi ini pada akhirnya masing-masing pemangku kepentingan sepakat untuk menjalin kolaborasi. Terdapat kesepakatan tidak tertulis dalam kolaborasi yaitu pihak swasta meminta bank sampah untuk aktif dalam kegiatan ataupun program yang dicanangkan nantinya dan memenuhi target yang diminta dari pihak swasta. Lalu pihak pemerintah meminta pengelola bank sampah dapat menjalankan proses pengelolaan bank sampah secara konsisten dengan adanya laporan kinerja pengelolaan bank sampah. Kemudian pihak bank sampah sendiri meminta adanya pembinaan pengetahuan ataupun pengelolaan sampah yang dilakukan secara rutin supaya dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada di Bank Sampah Indria Jaya serta adanya dukungan sarana & prasarana yang memadai.

D. *Implementation*

Dalam implementasi kolaborasi yang terjadi di Bank Sampah Indria Jaya telah disepakati pembagian tugas di antara aktor yang terlibat. Bank Sampah sendiri memiliki tugas yaitu langsung menangani sampah-sampah dari masyarakat sekitar Kelurahan Kalipancur. Sedangkan untuk pihak pemerintahan Kelurahan Kalipancur sebagai penanggung jawab yang mendukung dan memfasilitasi tempat atau lahan Bank Sampah Indria Jaya di Kelurahan Kalipancur. Kemudian, pihak kelurahan juga sebagai penyalur informasi jika ada undangan dari instansi lebih tinggi seperti DLH Kota Semarang. Sedangkan untuk DLH Kota Semarang selaku penanggung jawab pusat yang menangani urusan

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan bidang Kehutanan. DLH Kota Semarang juga memberikan dukungan berupa dibangunkannya kantor yang dilengkapi oleh peralatan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan bank sampah seperti tosa, meja, kursi, komputer, printer, dan lemari. Lalu terdapat pengepul sampah yang bertugas untuk mengumpulkan dan membeli sampah di Bank Sampah Indria Jaya yang mana nantinya sampah tersebut akan dijual kembali untuk didaur ulang. Kemudian dari pihak swasta yaitu Yayasan Bintari yang juga mendapat dukungan dari pihak PT *Indofood* sebagai lembaga donor memberikan pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM masyarakat kelurahan seperti pelatihan ecobrick, ecoenzim, dll. Pihak swasta tidak hanya memberikan pembinaan tetapi juga memberikan beberapa sarana prasarana pendukung untuk pengolahan sampah. Salah satu program yang belum lama dilaksanakan yaitu program *Indofood Waste Initiative* (IWI) yang merupakan program CSR Lingkungan PT *Indofood* bekerjasama dengan Yayasan Bintari yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah melalui peran masyarakat dalam institusi bank sampah dan *warmindo*. Beberapa capaian program ini hingga tahun 2022 di antaranya sebanyak 13 Bank Sampah salah satunya Bank Sampah Indria Jaya yang sudah berproses untuk secara konsisten melakukan pengelolaan sampah anorganik bernilai namun belum optimal dengan cara

mengumpulkan sampah e-tiket (bungkus mie tanpa aluminium foil). Hasil dari kolaborasi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta para aktor yang berkepentingan. Kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah berdampak positif terhadap proses kolaborasi. Hasil dari kolaborasi dalam Bank Sampah Indria Jaya sudah cukup dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat melalui beberapa program seperti Tukar Sampah dan Sedekah Jelantah. Masyarakat pun sudah mulai paham dengan mengelola sampahnya secara mandiri dapat mendatangkan manfaat-manfaat yang positif. Selain menjadikan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan terhindar dari banyaknya penyakit masyarakat juga mendapatkan pemasukan tambahan dari menjual atau menabung sampah anorganiknya ke Bank Sampah Indria Jaya. Pihak pemerintah maupun swasta sudah menetapkan bahwa Bank Sampah memiliki tugas untuk membuat laporan kinerja bank sampah sebagai bentuk penilaian progres bank sampah. Dalam keberjalanannya proses kolaborasi pengelola Bank Sampah Indria Jaya memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah setiap triwulan dan swasta setiap bulan sekali. Mekanisme pelaporan ini berberntuk *file* yang berisikan jumlah sampah yang terkumpul, jenis sampah, dan nilai uangnya.

Dari pengamatan peneliti fakta di lapangan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan untuk pemerintah khususnya DLH Kota Semarang bisa dikatakan hanya sebagai formalitas saja dan tidak ada tindak

lanjut evaluasi yang diberikan kepada Bank Sampah Indria Jaya. Sedangkan dari pemerintah kelurahan, pihak bank sampah juga tidak mengumpulkan sama sekali laporan kinerja bank sampah dan tidak ada kejelasan mengapa bank sampah tidak memberikan laporan tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan laporan pertanggungjawaban untuk pihak swasta. Pasalnya laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi penilaian keberhasilan dan keberlanjutan proses kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah di Bank Sampah Indria Jaya Kelurahan Kalipancur. Adapun standart yang dibuat oleh pihak swasta meminta untuk bank sampah dapat menarik banyak nasabah dari masyarakat dan jumlah sampah yang dikumpulkan di bank sampah stabil. Dari tuntutan dari pihak swasta tersebut bank sampah harus menjaga konsistensi dan komitmen mereka dalam mengelola sampah. Permasalahan yang muncul dari kolaborasi ini adalah perbedaan persepsi yang dirasakan oleh masing-masing pemangku kepentingan dimana pemerintah lebih mengutamakan pengolahan sampah sebagai bentuk untuk mengurangi jumlah timbunan sampah. Kemudian pihak swasta lebih mengarah kepada *benefit* berupa nilai ekonomis yang diperoleh dari Bank Sampah. Sehingga selama keberjalanannya masyarakat lebih fokus mencari nilai ekonomi dari pada melihat sisi pengelolaan sampah itu sendiri. Masyarakat kurang tertarik dalam hal pengolahan sampah menjadi barang yang bermanfaat seperti ecoenzim, ecobrick, ataupun yang lainnya. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu yang dirasakan oleh pihak bank sampah sendiri

dalam keberjalannya pihak pemerintah khususnya DLH Kota Semarang kurang memperhatikan bank sampah yang mana tidak ada tindak lanjutnya setelah diresmikan bank sampah tersebut, pemerintah kurang memberikan pembinaan bagi bank sampah misalnya kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan lain sebagainya.

Idealnya dalam kolaborasi ini seharusnya masing-masing pemangku kepentingan terlibat aktif sehingga tidak ada pemangku kepentingan yang memiliki kedudukan yang lebih dominan. Hal ini terjadi juga karena tidak ada kesepakatan tertulis yang jelas untuk masing-masing pemangku kepentingan dari awal kolaborasi pembentukan bank sampah. Meski demikian, pengelola Bank Sampah Indra Jaya tetap berkomitmen kuat untuk melanjutkan pengelolaan sampah di bank sampah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa terdapat kebutuhan signifikan dari masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan bank sampah sebagai sumber pendapatan ekonomi.

Faktor-Faktor Keberhasilan Collaborative Governance di Bank Sampah Indria Jaya

A. *Networked Structure*/ Struktur Jaringan

Poin pertama dari 8 kriteria keberhasilan *collaborative governance* yaitu *networked structure* atau struktur jaringan, dalam hal ini dapat dilihat apakah pemerintah selaku pemegang kendali dalam kolaborasi di Bank Sampah Indria Jaya juga telah mengajak swasta dan masyarakat untuk membentuk jaringan kerjasama. hubungan bank sampah dengan pihak pemerintah

khususnya DLH Kota Semarang sebenarnya terjalin cukup baik akan tetapi pihak bank sampah mengeluhkan jika ada undangan dari pihak DLH Kota Semarang tidak ada biaya transportasi yang diberikan. Keluhan tersebut tidak ada jawaban dari pihak pemerintah sampai sekarang yang membuat pihak bank sampah menilai bahwa bank sampah belum diakui oleh institusi yang berkepentingan. Hal tersebut juga didukung dari fakta bahwa kurangnya pendekatan dan pembinaan untuk bank sampah oleh pemerintah.

Akan tetapi meskipun begitu pemerintah Kelurahan Kalipancur memfasilitasi komunikasi melalui media sosial seperti WA. Media tersebut memberikan kemudahan jika ada informasi penting seperti undangan dari pihak pemerintah maupun pihak swasta serta kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kolaborasi akan dibagikan melalui *platform* tersebut. Dari pihak Yayasan Bintari *Foundation* juga memfasilitasi *platform* media sosial untuk berbagi informasi dan *update* kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mitra mereka. Menurut peneliti komunikasi pihak swasta dengan pihak bank sampah lebih terjalin dengan baik karena pihak swasta juga hampir setiap minggunya mengunjungi Bank Sampah Indria Jaya dan sering melakukan program-program yang melibatkan bank sampah.

Sedangkan hubungan yang terjalin antara bank sampah dengan masyarakat itu sendiri terjalin secara baik yang mana didukung dari hasil wawancara dengan Ibu Susilowati selaku masyarakat Kalipancur yang menjelaskan bahwa setiap RT/RW mengadakan pertemuan rutin seminggu sekali.

Dalam kegiatan rutin tersebut, masyarakat sering diajak untuk mengikuti kegiatan pelatihan misalnya ecoenzym, ecobrick dan lain sebagainya oleh pihak bank sampah. Kemudian didukung juga oleh kader-kader PKK yang membantu menyampaikan ke warga untuk mendukung bank sampah supaya lingkungan bersih dan sehat. Dukungan dari berbagai pihak itu yang menjadikan komitmen pengurus bank sampah menjadi kuat.

B. Komitmen Terhadap Tujuan

Kriteria keberhasilan yang kedua yaitu komitmen terhadap tujuan, tentunya tujuan yang ingin dicapai bersama dalam kolaborasi di Bank Sampah Indria Jaya yaitu Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan merupakan tujuan utama. Pada dasarnya, keberadaan bank sampah dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Awal mula komitmen kolaborasi ini dibentuk dilatarbelakangi alasan setiap aktor. Dari pihak Kelurahan Kalipancur dan Bank Sampah Indria Jaya alasan mau bekerjasama yaitu dengan alasan keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai sehingga dengan menjalin kerjasama dapat meningkatkan kualitas SDM dan terpenuhinya sarana prasarana di Bank Sampah Indria Jaya. Keuntungan pihak DLH Kota Semarang dengan adanya kolaborasi ini pastinya dapat terbantu tugasnya dalam hal pengelolaan sampah. Kemudian dari pihak swasta khususnya PT *Indofood* selaku lembaga donor yang memiliki program kerja CSR dapat tersalurkan dengan baik melalui kolaborasi di Bank Sampah Indria Jaya. Sedangkan dari pihak Yayasan *Bintari Foundation*

mendapatkan *benefit/profit* yang mana program yang telah dicanangkan sesuai dengan kebutuhan bank sampah dapat terselenggara dari dukungan PT *Indofood* selaku lembaga donor. Strategi yang dilakukan oleh Bank Sampah Indria Jaya Kelurahan Kalipancur untuk mendorong keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dilakukan secara aktif. Hal ini dibuktikan dengan sering diadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar di lingkungannya masing-masing agar dapat memilah sampah dengan baik melalui pertemuan rutin RT/RW setiap minggunya.

Sedangkan dari pihak swasta yaitu Yayasan *Bintari Foundation* selain menjalin komunikasi dengan baik mereka juga memiliki komitmen yang ditunjukkan dalam proses kolaborasi yaitu dengan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi Bank Sampah Indria Jaya secara rutin setiap bulan sekali. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan pihak Yayasan *Bintari Foundation* dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bank sampah. Bentuk komitmen yang terus dilakukan oleh Yayasan *Bintari Foundation* ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pihak bank sampah yang memenuhi kriteria dan standar dari pihak swasta. Bank Sampah Indria Jaya juga aktif dalam forum yang diadakan oleh Yayasan *Bintari Foundation*. Dapat disimpulkan bahwasannya sinergi yang terjadi dalam kolaborasi sudah berjalan cukup baik meskipun ada pemangku kepentingan yang belum optimal dalam mencapai tujuan bersama.

Seiring berjalannya waktu komitmen yang dibangun sejak awal kolaborasi mengalami

perubahan karena masing-masing aktor memiliki kepentingan masing-masing. Perubahan yang paling terlihat dalam kolaborasi ini yaitu pihak swasta, Yayasan Bintari *Foundation* saat ini sangat mengedepankan keuntungan semata dari Bank Sampah Indria Jaya. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mianto selaku Ketua Bank Sampah Indria Jaya pada 19 September 2023 menyebutkan bahwa saat ini bank sampah dituntut untuk mengedepankan profit dari hasil penjualan bank sampah. Sehingga pihak bank sampah setiap tahunnya harus memenuhi target yang telah ditentukan oleh pihak swasta supaya kolaborasi dapat berlanjut. Hal ini berdampak pada masyarakat Kelurahan Kalipancur yang saat ini hanya fokus menjual sampah ke bank sampah untuk menaikkan nilai ekonomi tanpa melihat dari sisi pengelolaan sampah itu sendiri. Beberapa masyarakat Kalipancur menjadi kurang tertarik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti *ecobrick*, *ecoenzyme*, dan lain sebagainya. Dari masalah tersebut peneliti menilai bahwa terjadi perubahan pola pikir diantara aktor kepentingan yang mana tujuan awal kolaborasi bank sampah yaitu untuk mengurangi timbunan sampah di Kelurahan Kalipancur yang dikoordinir oleh Bank Sampah Indria Jaya dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kalipancur supaya terlibat aktif dalam pengelolaan sampah berubah terfokus hanya untuk mencari profit/keuntungan semata dari penjualan sampah.

Kemudian pembagian hasil antara bank sampah dengan pihak Yayasan Bintari *Foundation* ini dilakukan setiap satu tahun tutup buku. Pihak Yayasan Bintari *Foundation* nantinya akan

menganalisis dan menilai dari hasil laporan pertanggungjawaban keuangan Bank Sampah Indria Jaya. Untuk sistem persentase pembagian hasilnya sendiri peneliti memiliki kekurangan karena tidak mendapatkan akses data tersebut karena bersifat tertutup untuk pihak bank sampah dengan Yayasan Bintari *Foundation*. Hal ini juga yang menjadikan Bank Sampah Indria Jaya sangat bergantung kepada pihak swasta supaya bank sampah tetap berjalan sampai saat ini.

- C. Kepercayaan diantara Para Peserta
- Kriteria keberhasilan *collaborative governance* yang ketiga yaitu setiap pemangku kepentingan harus saling percaya sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin sehingga masing-masing di antara mereka menjalankan fungsinya dengan baik. Kepercayaan yang dijalin dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya juga terjalin karena terdapat transparansi dan keterbukaan di antara pemangku kepentingan misalnya ketika ada masalah, Bank Sampah Indria Jaya selalu berkonsultasi dan meminta saran dari pemangku kepentingan lainnya. Dan pemangku kepentingan memberikan saran-saran dan masukan yang mendukung untuk kepentingan bank sampah. Pemangku kepentingan dapat dinilai sigap dalam menanggapi keluhan-keluhan yang ada. Hal ini memberikan gambaran bahwa masih terdapat hierarki/tingkatan dalam hubungan *collaborative governance* yang mana seharusnya dalam kolaborasi itu setiap pemangku kepentingan memiliki kesetaraan dan tidak ada aktor yang lebih dominan dalam kolaborasi.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat saling dukungan antara pemerintah dan masyarakat Kelurahan Kalipancur jika ada pembahasan atau permasalahan yang muncul di Bank Sampah Indria Jaya. Begitu juga pengurus Bank Sampah Indria Jaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Artinya dalam hal membangun kepercayaan yang dilakukan pemerintah baik kepada swasta maupun masyarakat sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya diskusi diantara mereka. Manfaat adanya bank sampah selain fokus terhadap lingkungan tetapi juga bisa menjadi media saling tolong menolong antar warga sehingga tercipta lingkungan yang guyub rukun.

D. Governance

Governance merupakan kriteria keberhasilan collaborative governance yang didalamnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan antara mana elemen yang memang menjadi pondasi utama mana elemen yang hanya menjadi tambahan. Seperti halnya dengan pemerintah melalui Pemerintah Kelurahan Kalipancur yang sudah mengetahui dengan jelas bahwa elemen yang masuk dalam kolaborasi adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam faktor governance ini terdapat adanya boundary (batasan) dan excludivity (terpisah). Hal ini berarti bahwa setiap pemangku kepentingan atau anggota yang terlibat memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah disini khususnya DLH Kota Semarang memiliki kedudukan sebagai instansi paling tinggi sebagai pemeran kunci dalam proses kolaborasi. Memiliki kewajiban dalam membina dan membimbing

pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya. Selain itu, juga sebagai pemegang kendali dalam pengambilan keputusan dalam kolaborasi. Kemudian Pemerintah Kelurahan Kalipancur memiliki kedudukan sebagai perpanjangan tangan dari DLH Kota Semarang yang dimana Pemerintah Kelurahan Kalipancur juga berperan sebagai penanggung jawab dalam hal pewilayahan pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya. Jadi, ketika ada keputusan dan wewenang tugas dari atas maka pihak pemerintah kelurahan memiliki kewajiban menyampaikannya kepada bank sampah dan masyarakat Kelurahan Kalipancur serta mendukung program bank sampah. Sedangkan PT Indofood CBP Sukses Makmur selaku pihak donor yang memiliki program CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Dalam hal ini pihak Yayasan Bintari Foundation yang memiliki konsen terhadap lingkungan hidup mendapatkan dukungan oleh PT Indofood selaku donor untuk memberikan pembinaan baik berupa bantuan sarana prasarana dan pelatihan-pelatihan untuk Bank Sampah Indria Jaya.

Kemudian indikator selanjutnya dalam governance yaitu adanya aturan dimana dalam indikator ini memberikan batasan-batasan terhadap pihak yang terlibat. Dalam kolaborasi ini pihak-pihak yang terlibat berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan di pasal 35 bahwa pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola

sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk tetapi tidak terbatas pada menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Masyarakat juga diberi wewenang untuk memberikan saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat guna meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Kemudian dari peraturan tersebut diperjelas kembali melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah bagian paragraf 2 pasal 11-14 tentang Kewajiban Masyarakat dan Pelaku Usaha. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan sampah setiap aktor mulai dari pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah. Sehingga dalam kasus ini tiga aktor tersebut berkolaborasi dalam bentuk Bank Sampah yang ada di Kelurahan Kalipancur.

Kemudian hingga tahun 2023 pemerintah memiliki kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang termuat dalam Peraturan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Isi peraturan tersebut lebih terinci dalam merinci target-target terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis rumah tangga di tingkat kota Semarang untuk periode tahun 2018-2025. Dari target yang sudah dicanangkan maka ada juga program dan strategi dalam pengelolaan sampah yaitu salah satunya dengan mendirikan bank sampah. Artinya pemerintah sudah berusaha setiap tahunnya untuk mendirikan bank sampah di setiap daerah akan tetapi dalam hal operasionalisasi bank sampah itu sendiri masih kurang dari pemerintah. Dalam konteks ini, pembinaan yang diberikan oleh pemerintah menjadi aspek yang relevan kepada bank sampah masih minim sehingga kualitas kinerja bank sampah belum sepenuhnya maksimal.

Kemudian tata kelola yang dilakukan dalam kolaborasi ini dapat dilihat dari adanya transparansi dan akuntabilitas berupa laporan pertanggungjawaban kinerja Bank Sampah Indria Jaya seperti laporan kas umum yang berisi pengeluaran, pemasukan, pembalian, dan penjualan setiap bulannya.

E. Pembagian Tanggung Jawab yang Jelas

Dalam implementasi program pengelolaan sampah secara kolaboratif, prosedur pelaksanaan (SOP) telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pembagian akuntabilitas dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah melibatkan pembagian

tanggung jawab dan wewenang dari tiap *stakeholder*.

Pembagian tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas dan keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi adalah hal yang esensial. Dalam konteks ini, bank sampah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung serta melaksanakan program bank sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah di sekitar Kelurahan Kalipancur. Sedangkan pihak pemerintah dan swasta memiliki tanggung jawab sebagai instansi tertinggi dan yang membina Bank Sampah Indria Jaya melalui edukasi dan pelatihan-pelatihan dari program yang telah dicanangkan.

Analisis yang didapatkan menurut data pendukung di lapangan yaitu adanya keluhan dari pihak bank sampah sendiri terkait sarana dan prasarana pendukung administrasi di Kantor Bank Sampah yang masih belum memenuhi. Pemerintah Kelurahan Kalipancur selaku perpanjangan tangan pihak DLH Kota Semarang langsung menyampaikan keluhan tersebut ke atas. Hasilnya pun positif dari pihak DLH Kota Semarang pada tahun 2020 menganggarkan bantuan berupa komputer, printer, meja komputer, kursi tamu, timbangan, rak besi, dan filling cabinet kepada Bank Sampah Indria Jaya. Kemudian contohnya lainnya, adanya keluhan dari masyarakat terkait kendala ketika ingin menabung bank sampah tetapi terkendala dalam hal jarak dan transportasi menuju Bank Sampah Indria Jaya. Dari masalah tersebut pihak bank sampah memberikan Solusi dengan adanya penjemputan sampah langsung ke rumah-rumah. Jadi ketika ada masyarakat yang terkendala mereka bisa langsung

menghubungi kontak yang disediakan oleh bank sampah.

F. Berbagi Informasi

Pembagian informasi yang jelas merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan untuk mensinkronkan keadaan satu elemen dengan elemen lainnya. Dalam hal ini pihak Bank Sampah Indria Jaya merasa sudah terfasilitasi alur informasi yang jelas dari pemerintah. Dengan adanya media sosial berupa grup paguyuban bank sampah mulai dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan sehingga berbagai informasi mudah diakses.

Dari pihak pemerintah maupun swasta menyediakan fasilitas komunikasi sebagai bentuk menjalin kerjasama. Ketika ada informasi baik dari instansi pusat ataupun pihak swasta, bank sampah akan mengaksesnya dengan mudah melalui *platform* tersebut. Selain berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi di antara pemangku kepentingan, media ini juga berperan sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi dan sebagai alat pemantauan terkait harga jual sampah di bank sampah. Melalui platform ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank sampah dapat terus diperbarui, sehingga arsip mengenai kegiatan tersebut dapat disimpan dengan baik.

Kemudian pihak Bank Sampah Indria Jaya juga setiap minggunya melakukan pertemuan-pertemuan RT/RW yang tujuannya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masing-masing RT/RW dapat mengelola sampahnya sesuai dengan jenisnya. Kemudian dapat dikumpulkan dan dijual di Bank Sampah Indria Jaya.

G. Akses Terhadap Sumber Daya

Untuk saat ini SDM dan infrastruktur Bank Sampah Indria

Jaya bisa dikatakan sudah tercukupi. Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa bantuan infrastruktur yaitu didirikannya kantor dan gudang Bank Sampah Indria Jaya itu merupakan bantuan dari Pemerintah Kelurahan Kalipancur dan Bintari *Indofood* pada tahun 2016 dan 2018. Pengurus Bank Sampah merupakan masyarakat asli yang ditunjuk oleh Pemerintah Kelurahan Kalipancur secara sukarelawan dengan jumlah anggotanya tidak begitu banyak supaya pembagian hasilnya lebih menguntungkan. Kendala yang dialami sebelumnya yaitu banyak SDM yang terpilih untuk menjadi pengurus bank sampah tetapi beberapa SDM kurang berkontribusi dan bertanggung jawab atas tugasnya ditambah lagi dengan tuntutan untuk tetap membayar gaji pengurus tersebut dari hasil penjualan. Dari pengalaman tersebut maka pihak bank sampah mengambil Langkah untuk merampingkan kepengurusan periode selanjutnya supaya lebih efektif dan pembagian hasilnya lebih maksimal. Bank sampah mencari masyarakat yang betul-betul komitmen untuk menjadi relawan di bank sampah.

Kemudian dalam hal transparansi proses alokasi sumberdaya di Bank Sampah Indria Jaya sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya arsip laporan berupa sumber daya apa saja yang dimiliki oleh Bank Sampah Indria Jaya mulai dari bantuan dari DLH Kota Semarang, Pemerintah Kelurahan Kalipancur, Bintari *Indofood*, ataupun dari pengadaan peralatan sendiri dari uang bank sampah. Kemudian Bank Sampah Indria Jaya memiliki buku kas yang bersisi keuangan bank sampah mulai dari pembelian dan penjualan sampah.

Pihak pemangku kepentingan lainnya juga aktif meng-*update* ke sosial media berupa berita dan dokumentasi kegiatan-kegiatan Bank Sampah Indria Jaya sehingga masyarakat mudah mengakses kegiatan dan perkembangan bank sampah.

KESIMPULAN

Dari penelitian dan temuan langsung mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya, di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.:

1. Terdapat berbagai permasalahan dalam proses tahapan *Collaborative Governance* dimulai dari perbedaan persepsi yang dirasakan oleh masing-masing pemangku kepentingan dimana pemerintah lebih mengutamakan pengolahan sampah sebagai bentuk untuk mengurangi jumlah timbunan sampah. Kemudian pihak swasta lebih mengarah kepada *benefit* berupa nilai ekonomis yang diperoleh dari Bank Sampah. Sehingga selama keberjalanannya masyarakat lebih fokus mencari nilai ekonomi dari pada melihat sisi pengelolaan sampah itu sendiri. Kemudian permasalahan muncul juga karena tidak adanya kesepakatan ataupun komitmen tertulis sejak awal sehingga beberapa aktor tidak melakukan tugasnya secara maksimal dan tidak terlibat aktif dalam kolaborasi yang telah berjalan.
2. Beberapa kriteria pendukung keberhasilan *collaborative governance* belum sepenuhnya maksimal di laksanakan yang menjadikan kolaborasi menjadi

gagal karena terdapat kedudukan yang tidak seimbang didalam struktur jaringan kolaborasi yang menimbulkan adanya hirarki antar pemangku kepentingan. Kemudian dalam faktor komitmen terhadap tujuan yang mana pihak pemerintah masih kurang aktif berkontribusi dalam melakukan pembinaan dan arahan kepada pihak bank sampah. Hal ini pula yang menimbulkan faktor ketidakpercayaan mulai muncul dari aktor lainnya yang menganggap apa yang dilakukan pemerintah hanya sebuah formalitas. Akan tetapi kolaborasi Bank Sampah Indria Jaya tetap bisa berjalan dengan baik dengan memaksimalkan apa yang sudah baik mulai dari transparansi kinerja bank sampah, menjalin komunikasi efektif antar pemangku kepentingan, menjaga komitmen untuk mencapai target yang telah ditentukan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Bank Sampah Indria Jaya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan diatas, maka berikut ini saran atau masukan dari peneliti bagi pemangku kepentingan agar kolaborasi yang dilakukan lebih efektif kedepannya sebagai berikut:

1. Pemerintah terkait dalam pengelolaan sampah sebaiknya lebih memperhatikan kesepakatan bersama untuk didirikannya bank sampah dengan cara memberikan pembinaan secara berkala supaya target pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah dapat tercapai. Harus ada kesetaraan kontribusi untuk setiap

pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi.

2. Keterlibatan aktif dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang diperlukan dalam pengelolaan sampah karena bank sampah dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat membantu menangani masalah lingkungan. Serta partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah perlu ditingkatkan kembali dengan cara melakukan sosialisasi rutin baik dari pemerintah, swasta, dan pihak bank sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Beni Ahmad. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory, 18(4)*, 543-571.
- CHOFIFAH, A. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2021). Model *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional, 27(3)*, 348-376.
- Creswell, J. W. (2009). *Edisi Ketiga Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. California: Sage Publications.

- Damayanti, R., & Susilih, S. (2014). Efektivitas Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah (Studi tentang Bank Sampah di Kecamatan Sukmajaya, Depok). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1, 1-17.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Fauziah, H. (2018). Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung.
- Greenwood, S., Singer, L., & Willis, W. (2021). *Collaborative governance: Principles, processes, and practical tools*. Routledge.
- Habibah, E. N., Sos, S., & Rumah, P. P. (2020). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Harmana, D., Wargadinata, E. L., & Nurdin, I. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis *Collaborative Governance* Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(2), 247-260.
- Harmawan, B. N. (2017). *Collaborative Governance* Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival.
- Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2020). Praktik *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 2(1), 34-40.
- HUTAGALUNG, N. A. (2014). *Collaborative Governance dalam Manajemen Promosi Pariwisata Danau Toba Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Idris, I., Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Ikram, M. (2020). PENDEKATAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH KECAMATAN MANGGALA. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 94-110.
- ISWANTO, I. (2021). *Collaborative Governance Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Jahro, S. (2018). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, Dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan.
- Lestari, R. M., & Farahnisa, T. (2020). *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu. *ijd-demos*, 2(3).
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Miles, M., & Huberman, A. M. (2007). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012.

- Peraturan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujiyanto, S. (2016). Analisis Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 5(3), 102218.
- Shentika, P. A. (2016). Pengelolaan bank sampah di Kota Probolinggo. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1), 92-100.
- Qalby, A. N. (2018). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat).
- Syukri, A. M. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PADA SUPER DEPO SUTEREJO KOTA SURABAYA* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Wahyudiantik, Y. (2013). *Collaborative Governance* Pengolahan Limbah Sapi (Studi: Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Pengolahan Limbah Sapi Menjadi Biogas Di Kabupaten Ngawi).